



**Judul** : Pembeli Meikarta Mengadu ke DPR  
**Tanggal** : Kamis, 19 Januari 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 10

# Pembeli Meikarta Mengadu ke DPR

PEMBELI Apartemen Meikarta yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, mengadu ke DPR terkait dengan tidak kunjung ditunaikannya serah terima Apartemen Meikarta atau dikabulkannya permintaan *refund* mereka.

Menurut, Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana, rata-rata anggota komunitas itu dijanjikan serah terima unit antara 2018 sampai 2022. Namun, sampai saat ini janji tersebut belum ditunaikan. Bahkan, sebagian besar area yang seharusnya dibangun apartemen masih berupa lapangan tanah merah terutama yang berada di distrik 2 dan 3.

Sejak gagal serah terima unit, para konsumen telah berupaya menyurati dan me-

nyampaikan keluhan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) per 13 Juli 2022. Namun, belum mendapatkan tanggapan apa pun.

Selain itu, secara parsial, perorangan, pembeli apartemen juga mendatangi manajemen PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), meski selalu hanya dihadapkan kepada *sales*.

“Dengan selalu kalimat mereka yang sama, yaitu “Kami berkomitmen akan meneruskan pembangunan,”. Namun, sampai hari ini tetap tidak ada kepastian penyelesaiannya. Saat ini kami anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya dan sepakat memohon untuk *refund* atau pengembalian dana,” kata

Aep, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VI DPR, kemarin.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN Daeng Muhammad mengatakan sejak awal proses pembangunan Meikarta sudah melenceng dan memiliki masalah, dengan bukti ditangkaptangannya pemda dan Bupati Bekasi.

Konsumen menjadi sulit meminta pertanggungjawaban lantaran berhadapan dengan perusahaan sebesar Lippo Group. DPR tidak seharusnya kalah dengan pengusaha besar oligarki seperti itu. “Konsumen telah bayar dan punya hak untuk mendapatkan unit mereka,” kata Daeng.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan DPR harus bisa melawan kezaliman dari oligarki pengusaha tersebut. Tiga komisi harus bersatu untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI terkait dengan perbankannya. (Try/E-3)